

## Kesetaraan Gender dan Pendidikan Humanis

Erda Fitriani<sup>1\*</sup>, Neviyarni Neviyarni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [fitriani\\_cim@fis.unp.ac.id](mailto:fitriani_cim@fis.unp.ac.id).

### Abstract

Gender equality is still a target for countries that are members of the SDGs, including Indonesia. Efforts to improve gender equality are mainly through education, both family education and school education. Gender responsive education has been carried out in Indonesia and has become a target for sustainable development with the SDGs program, which is targeted to be achieved by 2030. Various phenomena of gender inequality are still encountered in society. This shows that there are problems in the perception and application of gender equality. One of the efforts to give birth to justice and gender equality is through education. Therefore, this article aims to explain the concept of gender and gender equality and then gender equality education.

**Keywords:** Gender; Gender Equality; Humanistic Education.

**How to Cite:** Fitriani, E. & Neviyarni, N. (2022). Kesetaraan Gender dan Pendidikan Humanis. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 1(1), 51-56



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

## Pendahuluan

Kesetaraan gender masih menjadi target bagi negara yang tergabung dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan sidang umum pada tahun 2015, dihadiri oleh 193 negara anggota, PBB menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/SDGs salah satunya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (Prasetyawati, 2018). Upaya dalam meningkatkan kesetaraan gender terutama adalah melalui pendidikan, baik pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga maupun pendidikan yang dilakukan di sekolah, serta didukung dengan sarana dan prasarana lainnya. Pendidikan responsif gender sudah dilakukan di Indonesia dan menjadi target Millennium Development Goals (MDGs).

Pencapaian MDGs di bidang pendidikan di Indonesia telah mencapai target yang diupayakan yaitu mengurangi bias gender di tingkat pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan menghilangkan diskriminasi gender di semua tingkat pendidikan pada tahun 2015. Pencapaian juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan bagi perempuan menempuh pendidikan profesional. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara pembangunan manusia dengan pembangunan indeks pemberdayaan gender, terutama untuk daerah Indonesia bagian Timur. Selain itu angka partisipasi politik perempuan Indonesia masih rendah dengan kuota 30 % di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yaitu hanya 11,6 % yang dibentuk pada periode 2004-2009 (Asmanto, 2008). Dengan demikian memberikan pemahaman bahwa peranan perempuan masih sangat rendah dan sangat penting untuk melakukan pemberdayaan dan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan pada SDGs yang ditargetkan dicapai pada tahun 2030.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan relasi gender antara laki-laki supaya tidak timpang terlalu jauh. Bagaimanapun juga, di dalam pembangunan setiap individu diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan dan mengaktualisasikan dirinya dengan kemampuan yang dimiliki untuk pembangunan bangsa. Memberdayakan perempuan dalam pembangunan, dapat dimaknai dengan peran serta perempuan di sektor publik. Walaupun sudah banyak penelitian yang mengungkap keberhasilan perempuan yang terlibat di sektor publik seperti keberhasilan perempuan pengusaha di Yogya (Diahsari et al., 2015), keberhasilan kepala desa perempuan di Madura (Utaminingsih et al., 2020), keterlibatan perempuan dalam politik (Mukarom, 2008). Namun masuknya perempuan di sektor publik bukan berarti tidak membawa masalah bagi perempuan dan juga laki-laki. Masalah-masalah yang alami oleh perempuan dalam masyarakat masih saja sering terjadi. Kasus pelecehan terhadap perempuan, diskriminasi

---

dalam pekerjaan, perempuan yang masih dianggap belum bisa menjadi pemimpin, stereotipe negatif, pelabelan terhadap perempuan yang bekerja malam, masih saja marak diberitakan di dalam berbagai media (Fakih, 2008).

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan gender dalam pembangunan yaitu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan upaya sadar dan sistematis untuk menciptakan generasi yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan dapat merubah pola pikir manusia Indonesia sehingga memiliki kesadaran gender. Pendidikan berbasis kesadaran gender menjadi situasi yang urgen untuk diberikan melalui proses pembelajaran bagi siswa di sekolah dan juga di keluarga. Selain itu, pendidikan sangat penting bagi perempuan, karena perempuan (ibu) dalam Islam adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Peran perempuan dalam keluarga sangat penting memiliki pendidikan yang tinggi karena sangat berperan besar dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan. Tujuan pendidikan Nasional juga memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, serta mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan, baik di ranah ekonomi, politik, sosial, budaya dan juga ranah pendidikan itu sendiri. Suatu hal yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana pendidikan kesetaraan gender tersebut diterapkan di sekolah kepada peserta didik? Serta memperhatikan perbedaan minat dari peserta didik, dan memberi motivasi dalam pengembangan bakat peserta didik tersebut dalam rangka mewujudkan pendidikan yang humanis. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pendidikan kesetaraan gender. Pembahasan diawali dengan konsep gender dan kesetaraan gender, selanjutnya pendidikan kesetaraan gender dan implikasinya.

## Metode Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Artinya membatasi hanya pada sumber-sumber koleksi pustaka dengan tidak melakukan penelitian lapangan (Sugiyono, 2012). Sumber pustaka yang dimanfaatkan yaitu buku-buku, dan artikel-artikel hasil penelitian yang terbit secara online dan berkaitan dengan topik penelitian mengenai, gender, motivasi, dan pendidikan kesetaraan gender.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu kepada empat langkah riset kepustakaan meliputi; 1) menyiapkan peralatan untuk menyimpan data, 2) menyusun bibliografi kerja, 3) mengatur waktu dengan baik, 4) membaca sumber berupa buku dan artikel serta membuat catatan penelitian (Zed, 2004). Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kepustakaan ini yaitu mencari data-data mengenai topik yang hendak diteliti, membuat catatan, mengelompokkan bahan sumber tersebut berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa daftar check-list klasifikasi bahan penelitian berdasarkan topik dan fokus penelitian, skema penulisan, dan format catatan penelitian. Untuk mencegah kesalahan dalam proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi kesalahan informasi (kesalahan pengertian bersifat manusiawi yang mungkin saja bisa terjadi karena kekurangan pengetahuan peneliti) maka dilakukan pengecekan kembali daftar pustaka serta membaca ulang sumber. Laporan penelitian ini disusun berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan.

## Hasil dan Pembahasan

### Gender dan Kesetaraan Gender

Secara konseptual gender merupakan perbedaan sifat, serta peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh struktur sosial atau budaya masyarakat (Fakih, 2008). Secara umum dalam masyarakat mengelompokkan sifat atau karakteristik tertentu berdasarkan jenis kelamin tertentu. Laki-laki bersifat keras, kasar dan berani dan dibandingkan dengan sifat perempuan, bersifat lemah, lembut dan emosional. Perbedaan sifat ini terus ditanamkan di dalam masyarakat sejak kecil terutama di dalam keluarga. Anak perempuan tidak boleh berkata kasar, anak laki-laki tidak boleh cengeng sehingga hal ini terus tertanam di dalam masyarakat. Margaret Mead dalam penelitiannya pada tiga sukubangsa di Pasifik menemukan bahwa perbedaan karakter atau psikologis laki-laki dan perempuan bukanlah merupakan sifat yang universal, akan tetapi merupakan hasil bentukan budaya (Danandjaja, 2012). Dengan demikian, gender merupakan bentukan budaya. Ketika seorang anak perempuan yang baru lahir dan bahkan baru saja dinyatakan sebagai perempuan, seorang ibu sudah mempersiapkan nama, pakaian, warna, mainan yang sesuai untuk perempuan menurut pandangan masyarakat. Jika nama anak perempuan yang diberikan tidak mencirikan nama perempuan, maka akan dipandang aneh oleh masyarakat.

Secara fisik laki-laki dan perempuan sangat berbeda, terutama perbedaan secara biologis. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan merupakan kodrat atau pemberian dari Tuhan. Sebagai contoh, perempuan memiliki rahim, melahirkan dan menyusui anak merupakan kodrat perempuan. Kondisi fisik perempuan sering dikaitkan dengan tugas-tugas perempuan. Oleh karena perempuan melahirkan anak, maka tugas mengasuh dan mendidik anak dalam keluarga menjadi tugas perempuan. Padahal tugas tersebut juga merupakan tugas laki-laki dalam keluarga. Perbedaan gender selanjutnya membawa pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berkerja di luar rumah di sektor publik dan perempuan bekerja di dalam rumah atau sektor domestik. Pembagian kerja ini sudah ada sejak masa kehidupan berburu dan meramu, dan dianggap sebagai pembagian kerja yang paling awal dalam kehidupan manusia. Perempuan di sekitar lingkungan rumah atau tempat tinggal bertugas untuk meramu makanan, mengasuh anak, dan membersihkan rumah. Sedangkan laki-laki bertugas di luar rumah mencari makanan dengan cara berburu. Proses penanaman pengetahuan pembagian kerja laki-laki dan perempuan ini sudah ter-enkulturasikan dalam masyarakat dan terus di-sosialisasikan kepada generasi berikutnya.

Faktor agama, dan sosial budaya masyarakat memperkuat pemahaman pembagian kerja berdasarkan gender tersebut. Agama mengajarkan bahwa perempuan harus tunduk kepada suaminya. Secara budaya menanamkan nilai seorang perempuan harus patuh kepada suami. Sebagai contoh di India, ketika suami meninggal maka si istri juga ikut di-abu bersama dengan suami sebagai tanda bakti istri kepada suami. Masyarakat juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap laki-laki di dalam masyarakat. Di dalam banyak masyarakat termasuk di Indonesia ataupun Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal, dalam upacara makan bersama secara adat maka laki-laki diberikan kesempatan untuk makan terlebih dahulu. Jika kaum laki-laki selesai makan, maka giliran perempuan untuk makan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan, laki-laki diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Berbeda dengan perempuan, dia tidak bebas menentukan hidupnya sendiri, dia harus patuh kepada keputusan ayahnya, dan setelah menikah perempuan harus patuh kepada suaminya. Kondisi perbedaan ini di beberapa tempat sudah banyak berubah, akan tetapi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih dapat ditemukan. Ketimpangan relasi gender ini, masih ada karena selalu direproduksi masyarakat di dalam berbagi bidang kehidupan. Konstruksi sosial budaya yang dibangun jelas merugikan salah satu pihak dalam masyarakat, yaitu perempuan.

Budiman menjelaskan bahwa 'perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan pada dasarnya dijelaskan dengan dua teori besar; teori nature dan teori nurture (Budiman, 1985). Teori *nature* (alamiah) memiliki pandangan bahwa perbedaan sifat laki-laki dan perempuan merupakan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan itu. Perempuan memiliki sifat yang lemah, dan lembut karena kondisi perempuan yang mengalami proses reproduksi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki memiliki sifat yang kuat, berani karena faktor biologis, dan keharusan untuk menjaga dan melindungi keluarga. Perbedaan faktor biologis ini yang mengakibatkan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi berbeda. Laki-laki bekerja di sektor publik (luar rumah) dan perempuan bekerja di sektor domestik (dalam atau sekitar rumah). Pandangan ini mendapat penolakan dari teori nurture (budaya). Teori *nurture* (budaya) memiliki pandangan bahwa perbedaan sifat dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi masyarakat. John Stuart Mill menyatakan bahwa sifat perempuan dan laki-laki merupakan hasil 'ciptaan' masyarakat melalui suatu sistem pendidikan. Menurutnya usaha yang mengelompokkan manusia menjadi dua kategori laki-laki dan perempuan, dan usaha membedakan kedua kategori ini dalam peranan sosial yang berbeda merupakan suatu tindakan politik yang direncanakan (Budiman, 1985).

Simone de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex: fakta dan mitos* (Beauvoir, 2016) mendeskripsikan siapa perempuan dalam lintasan sejarah. Sejak keberadaan sejarah manusia, perempuan diposisikan sebagai jenis kelamin kedua. Dalam banyak kebudayaan tertua di seluruh dunia posisi perempuan selalu ditempatkan di posisi kedua setelah laki-laki. Agama memiliki peran yang besar dalam perbedaan tersebut, dalam kitab agama Samawi, perempuan dinyatakan sebagai pelengkap dan ciptaan utama adalah dari laki-laki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Oleh karena itu, perempuan harus tunduk dan patuh kepada laki-laki. Secara biologis perempuan memiliki kelemahan dibandingkan dengan laki-laki, karena masa menstruasi, kehamilan dan melahirkan merupakan kondisi dimana perempuan rentan terhadap bahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan. Meskipun secara fisik lemah dari pada laki-laki, akan tetapi bukan menjadi alasan laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Namun, nilai-nilai dalam masyarakat, adat dan tradisi budaya serta agama seperti mengakui bahwa perempuan harus tunduk pada laki-laki. Perempuan yang baik adalah mereka yang patuh kepada kekuasaan suami mereka.

Hegemoni laki-laki terhadap perempuan merupakan faktor budaya patriarki dalam masyarakat. Ortner menyatakan bahwa 'status perempuan yang menjadi nomor dua dalam masyarakat merupakan fakta di semua budaya' (Moore, 1998). Dengan demikian, Ortner melanjutkan bahwa sub-ordinasi perempuan merupakan sesuatu keadaan yang bersifat universal, dan keadaan ini bukanlah suatu hal yang terbawa sejak lahir (inherent), namun pemberian makna kultural, dan menempatkan ketidaksetaraan seksual pada tingkat

ideologi dan kebudayaan. Ortner menjelaskan kondisi ketidaksetaraan relasi laki-laki dengan perempuan dengan teorinya tentang 'alam' dan 'budaya'. Perempuan dikelompokkan dengan 'alam' dan laki-laki dikelompokkan dengan 'budaya'. Manusia dengan kebudayaan yang dimiliki mengolah, mengontrol alam dan bahkan menguasai alam. Perempuan merupakan hal yang 'alami' dan dekat dengan alam, dan dengan sewajarnya dikontrol dan dikuasai (Moore, 1998).

Perbedaan gender dalam kenyataannya memunculkan ketidakadilan gender bagi kelompok tertentu baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam berbagai penelitian, perempuan sebagai warga kelas dua lebih sering mengalami ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender tersebut yaitu: (1) Subordinasi, yaitu kondisi yang memposisikan perempuan pada posisi yang sangat rendah daripada laki-laki; (2) Stereotipe gender, yaitu penandaan untuk kelompok perempuan yang sering mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan; (3) Beban ganda, yaitu pekerjaan yang diberikan kepada perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki biasanya menyangkut pekerjaan sektor domestik dan juga sektor publik. Beban ini terasa berat karena menghabiskan waktu yang banyak, sedangkan laki-laki tetap hanya dibebankan pada satu sektor kerja saja yaitu sektor publik. Hal ini yang menyebabkan ketidakadilan gender bagi perempuan. (4) Marginalisasi, atau proses peminggiran perempuan dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan sosial budaya di dalam masyarakat seperti masuknya teknologi dalam pertanian mengakibatkan perempuan tidak lagi bekerja di sawah dalam memanen padi; (5) Kekerasan, yaitu perlakuan yang diterima oleh perempuan berupa kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal dan kekerasan psikis (Fakih, 2008). Kondisi ketidakadilan gender di tengah masyarakat perlu diperjuangkan supaya mendapatkan keadilan. Kaum feminis telah melakukan berbagai upaya dalam menggerakkan supaya munculnya keadilan gender atau kesetaraan gender. Dalam sejarah perjuangan kaum feminis telah cukup berhasil dalam merubah pola pikir masyarakat dan kaum perempuan itu sendiri untuk menyadari perlunya kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan suatu pandangan dan juga sikap bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Tujuan dari kesetaraan gender yaitu supaya setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama serta adil dalam masyarakat pada setiap bidang kehidupan. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 meresmikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women /CEDAW). Kesetaraan gender selanjutnya menjadi tujuan pembangunan nasional Indonesia dan sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesetaraan gender dalam pembangunan ditujukan pada berbagai bidang seperti, pendidikan, pekerjaan, politik dan sosial budaya.

### **Pendidikan kesetaraan gender dan implikasinya**

Kesetaraan gender dalam pendidikan berbeda maknanya dengan pendidikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam pendidikan artinya memberikan ruang, dan akses yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat membuka wawasan pengetahuan dan pengalaman perempuan. Pendidikan juga mengajarkan sikap dan keterampilan bagi perempuan. Pendidikan yang pertama kali diterima oleh anak manusia adalah di dalam keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu idealnya seorang ibu memiliki pendidikan yang memadai, agar dapat lebih bagus dalam mendidik anak-anaknya. Dengan demikian bangsa juga mendapatkan generasi penerus yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berguna bagi individu, agama, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Todaro menyatakan bahwa hampir pada negara berkembang, perempuan memperoleh pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Selanjutnya kemampuan baca tulis anak perempuan lebih rendah dibandingkan kepada laki-laki. Kesenjangan pendidikan antar gender terutama ditemukan pada negara-negara miskin (Natasha, 2013). Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, menempatkan pendidikan utama untuk anak laki-laki. Oleh karena faktor budaya dan ekonomi menyebabkan pilihan masyarakat lebih mengutamakan kaum laki-laki dalam memperoleh pendidikan yang tinggi.

Pendidikan memiliki peran yang cukup besar di dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk dapat terjadinya perubahan. Termasuk perubahan yang tadinya mengutamakan laki-laki dalam pendidikan menjadi mengutamakan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena kedua gender ini dapat memberikan sumbangsih yang sama dalam keluarga dan pembangunan. melalui pendidikan dapat juga memberikan pengetahuan bahwa keadilan gender harus tegakkan untuk anak perempuan yang selama ini mengalami diskriminasi pendidikan.

Efek pendidikan bagi perempuan sudah cukup banyak ditemukan bagi pembangunan. Di Kenya, perempuan yang setidaknya sekolah empat tahun mampu memahami dengan benar instruksi untuk pemberian garam rehidrasi oral; namun hanya mereka yang berpendidikan minimal sekolah menengah yang dapat menjelaskan penyebab lingkungan daru diare. Keterkaitan pendidikan dengan kekuasaan di dalam dan di luar rumah tangga, ditemukan di pedesaan Bangladesh. Perempuan yang berpendidikan di daerah pedesaan berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang lebih luas dibandingkan dengan yang tidak



---

berpendidikan. Begitu juga efek lainnya, perempuan yang berpendidikan juga lebih kecil kemungkinannya untuk menderita kekerasan dalam rumah tangga. Akses pendidikan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas manusia (Kabeer, 2005).

Pendidikan kesetaraan gender dapat dikategorikan atas tiga indikator menurut Duncan Wilson, hak atas pendidikan, hak dalam pendidikan dan hak melalui pendidikan. Ketiga hak ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Indikator kesetaraan gender dapat memberikan informasi mengenai 'penduduk' lembaga pendidikan berdasarkan gender, serta menunjukkan keterwakilan bagi laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang relatif sama. Hak 'untuk' pendidikan diukur dalam hal akses, kelangsungan hidup, kehadiran, retensi, dan transisi tingkat pendidikan sampai batas tertentu. Selain itu kesetaraan gender melalui pendidikan dapat membentuk hak dan kesetaraan gender pada dimensi kehidupan lainnya (Subrahmanian, 2005).

Pendidikan kesetaraan gender beranjak pada konsep dasar pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi siswa agar dapat mengerti, dan membuat manusia lebih berpikir kritis. Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha terencana dan sistematis untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Freeman Butt menjelaskan pendidikan sebagai 'kegiatan memberi dan menerima pengetahuan agar budaya dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya; pendidikan merupakan suatu proses sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan, bakat dan minatnya; pendidikan merupakan rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman yang dapat menambah pemahaman dan keterampilan serta mampu memberi arah bagi pengalaman selanjutnya; pendidikan merupakan proses penyesuaian diri dengan unsur-unsur pengalamannya yang selanjutnya dapat menjadi kepribadian yang berguna dalam kehidupan modern sehingga dapat mempersiapkan diri bagi kehidupan dewasa yang sukses (Anwar, 2015).

Pendidikan kesetaraan gender merupakan upaya sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, sikap dan keterampilan terhadap peserta didik yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan kesetaraan gender dengan demikian juga menjadi salah satu upaya terencana dan sistematis untuk melakukan perubahan (merekonstruksi), pemahaman gender yang selama ini mengalami kesenjangan (*gap*) yang cukup lebar antara peran laki-laki dan perempuan dapat diminimalisasi, sehingga dapat mempersiapkan perempuan dan laki-laki yang sama memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik, yang jelas sangat berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Pendidikan kesetaraan gender dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, melalui: (1) pendidik, yang menjadi pendidik (guru di sekolah atau orang tua di rumah) hendaklah memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesetaraan gender, dan memiliki keyakinan bahwa pendidikan kesetaraan gender yang mereka ajarkan kepada peserta didik memang akan berguna bagi anak mereka di masa mendatang. Pemahaman guru atau pendidik yang masih bias gender maka akan sulit mengajarkan makna kesetaraan gender kepada peserta didik. Selain dari pada itu guru juga dapat menjadi *role model* bagi siswa di sekolah. Dengan demikian, pendidik diharapkan untuk memiliki pemahaman tentang kesetaraan gender. Sosialisasi kepada para pendidik telah dilakukan oleh pemerintah maupun peningkatan pengetahuan kesetaraan gender yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti dosen-dosen yang melakukan pengabdian masyarakat mengenai peningkatan pengetahuan kesetaraan gender. Guru yang 'sadar gender' akan dapat memberikan sosialisasi kesetaraan gender kepada siswa-siswanya. (2) peserta didik, peserta didik di rumah maupun di sekolah merupakan individu-individu yang terdiri atas gender yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi perbedaan itu tidak akan mengesampingkan aspek-aspek dalam proses pembelajaran. Guru hendaklah dapat memotivasi peserta didik, agar dapat memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Misalnya seorang perempuan yang memiliki keahlian dalam pertukangan, dan dia sangat berminat dan berbakat di bidang tersebut maka pendidik dapat memberikan motivasi dengan baik.

Begitu juga memberikan kebebasan bagi siswa perempuan untuk memilih dan memutuskan pendidikannya, mendorong perempuan untuk berani menyampaikan pendapatnya. Memberikan kesempatan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. perempuan yang ingin menjadi pemimpin, dan memiliki bakat dalam mengorganisir sebaiknya diberikan peluang yang sama, seperti juga laki-laki. (3) strategi pembelajaran dan media pembelajaran, dalam hal ini media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang disiapkan guru hendaklah bervariasi, karena adanya perbedaan karakteristik belajar peserta didik, termasuk juga perbedaan laki-laki dan perempuan. Strategi pembelajaran juga mengembangkan peserta didik untuk lebih aktif, memiliki kemampuan berpikir kritis dan sikap yang berani dalam menyampaikan pendapat, namun masih dalam ranah sikap seperti jujur dan bertanggung jawab (4) bahan ajar, bahan ajar yang disiapkan hendaklah memberikan dukungan untuk pendidikan kesetaraan gender. (5) evaluasi pembelajaran, dalam memberikan penilaian juga hendaklah tidak bias gender. Sehingga hasil belajar dari peserta didik dapat dinilai secara objektif. (6) kurikulum, aspek kurikulum dapat memasukkan contoh-contoh yang menunjukkan nilai-nilai kesetaraan gender dan

---

pemecahan masalah yang merujuk kepada kesetaraan gender. Kurikulum kesetaraan gender dapat diterapkan secara *hidden kurikulum* secara tersembunyi di dalam materi ajar di sekolah.

Pendidikan kesetaraan gender berlandaskan pada pendidikan humanistik, yaitu mempertimbangkan diversitas gender. Tujuan belajar teori humanistik yaitu mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap manusia, dalam artian tidak memandang apakah dia laki-laki atau perempuan. Peserta didik diharapkan mampu mengakulisasikan dirinya dengan baik. Guru hendaklah mampu memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Guru dalam hal ini sebagai fasilitator dan motivator. Guru membantu peserta didik untuk mampu mengenal dirinya dan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, serta mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik (Mudjiran, 2021).

## Kesimpulan

Kesetaraan gender merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh warga dunia dan juga Indonesia. Masalah kesenjangan gender yang terjadi pada perempuan dapat diatasi dengan melakukan pendidikan kesetaraan gender. Pendidikan kesetaraan gender merupakan perspektif pendidikan dengan filsafat humanistik. Teori humanistik memberikan ruang yang sama bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat yang dia miliki. Peserta didik dapat juga mengaktualisasikan dirinya dengan baik, tanpa khawatir dengan kondisi fisiknya yang perempuan. Pendidikan juga dapat sebagai saran rekonstruksi, yang dapat mengubah pola pikir supaya tidak lagi bias gender. Pemahaman dan pengetahuan pentingnya kesetaraan gender perlu diajarkan kepada peserta didik, karena dalam pembangunan di masa depan, laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Perempuan tidak lagi di diskriminasi, pemberian label yang tidak baik ataupun mendapatkan pelecehan seksual. Pendidikan membantu perempuan untuk dapat memahami lingkungan dan dapat mengatasinya. Kesetaraan gender melalui pendidikan dapat memberikan sumbangan atau berefek terhadap dimensi kehidupan lainnya, seperti aspek politik, ekonomi, hukum, serta sosial dan budaya.

## Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2015). *Filsafat Pendidikan (pertama)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Asmanto, P. (2008). The Evaluation of Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia: Gender Equality and Empower Women. <https://papers.ssrn.com/sol3/paper>
- Beauvoir, S. (2016). *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Yogyakarta: Narasi Pustaka.
- Budiman, A. (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita didalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Danandjaja, J. (2012). *Antropologi Psikologi: Teori Metode dan Sejarah Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diahsari, E. Y., Sumantri, S., Harding, D., & Sulastiana, M. (2015). Memaknai Keberhasilan Usaha: Studi pada Perempuan Pengusaha di Yogyakarta. *Psychology Forum UMM*, 978–979.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST PRESS.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender and Development*, 13(1), 13–24.
- Moore, H. L. (1998). *Feminisme dan Antropologi*. Yogyakarta: Obor.
- Mudjiran, M. (2021). *Psikologi Pendidikan: Penerapan Prinsip-Prinsip Psikologi Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270.
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, Dan Solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(1), 53. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 53. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>
- Subrahmanian, R. (2005). Gender equality in education: Definitions and measurements. *International Journal of Educational Development*, 25 (4), 395–407. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.04.003>
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utaminingsih, A., Sabariman, H., & Riniwati, H. (2020). Representasi Feminisme pada Kepemimpinan Perempuan di Madura (Studi Keberhasilan Kepala Desa Perempuan Menjadikan Desa Bunder Sebagai Desa Swakarya dan Desa Swasembada). *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 10(2), 173–185.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.